

## **PENGARUH BELANJA DAERAH DAN INVESTASI TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PERTUMBUHAN EKONOMI PADA KABUPATEN/KOTA PROVINSI BALI**

**I Putu Krismajaya<sup>1</sup>  
Ni Putu Martini Dewi<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia  
e-mail: krismajaya29@gmail.com

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh langsung Belanja Daerah dan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota Provinsi Bali, serta pengaruh tidak langsung Belanja Daerah dan Investasi terhadap Kesejahteraan Masyarakat melalui Pertumbuhan Ekonomi. Penelitian ini mencakup 9 Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali. Dalam lima tahun terakhir laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali mengalami peningkatan. Selain laju pertumbuhan yang semakin meningkat, laju kesempatan kerja di Provinsi Bali juga mengalami pertambahan dari tahun ke tahun. Namun fenomena yang terjadi masih terdapatnya kesenjangan Pertumbuhan Ekonomi antara Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan Belanja Daerah berpengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali. Belanja daerah tidak berpengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali. Belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat melalui Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali.

**Kata kunci:** belanja daerah, investasi, kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi.

### **ABSTRACT**

*This study aims to determine the direct effect of Regional Expenditures and Investment on Economic Growth in the Regency / City of Bali Province, as well as the indirect influence of Regional Expenditures and Investment on Community Welfare through Economic Growth. This research covers 9 regencies / cities in the province of Bali. In the last five years the rate of Regency / City Economic Growth in the Province of Bali has increased. In addition to the increasing growth rate, the pace of employment in Bali Province has also increased from year to year. But the phenomenon that occurs is still the gap of economic growth between regencies / cities in Bali Province. The analysis technique used is path analysis. The results showed that Regional Expenditures had a positive and significant direct effect on economic growth in Bali Province. Regional expenditure does not have a direct positive and significant effect on the welfare of the people in the Bali Province. Regional expenditure has a significant effect on people's welfare through Economic Growth in the Province of Bali.*

**Keywords:** regional expenditure, investment, community welfare, economic growth.

## **PENDAHULUAN**

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang sering digunakan untuk melihat perkembangan ekonomi suatu wilayah, sehingga setiap negara memperhatikan laju pertumbuhan ekonominya. Negara Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Perhatian tersebut ditandai dengan adanya penerapan kebijakan Otonomi Daerah, dimana kebijakan ini memberikan kebebasan setiap daerah untuk mengembangkan daerahnya sesuai dengan potensi yang ada. Ady Soejoto *et al.* (2015) Secara khusus penelitian hasil kebijakan desentralisasi fiskal dalam mempromosikan pembangunan manusia sebagai tinjauan ekonomi demokrasi di negara-negara dan kota-kota Indonesia dinilai berdasarkan tinjauan teoritis dan empiris. Secara umum kebijakan dana desentralisasi berdampak positif pada pembangunan manusia di setiap wilayah dan kota wilayah otonom.

Menurut Eleonora *et al.* (2015) di banyak negara, termasuk Indonesia, pemerintah terpusat memiliki dampak negatif yang cukup besar terhadap ketidaksetaraan pembangunan. Selama era Orde Baru dengan sistem terpusat, pembangunan Indonesia terkonsentrasi di bagian barat Indonesia yang menyebabkan ketidaksetaraan dalam hal pendapatan per kapita dan pembangunan manusia. Untuk mengatasi masalah ini, salah satu reformasi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah mengubah sistem dari sistem yang terpusat ke sistem desentralisasi. Melalui desentralisasi fiskal berdasarkan UU No. 23/2014 dan 33/2004, mereka berharap dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengurangi ketidaksetaraan.

Pulau Bali merupakan wilayah yang selama ini dikenal dengan kebudayaan serta tradisinya yang unik dan menarik, kebudayaan serta tradisi tersebut dikenal sangatlah khas dan beranekaragam, sehingga Pulau Bali memiliki daya tarik bagi masyarakat mancanegara maupun masyarakat pribumi yang terkenal sebagai salah satu daerah yang ingin berjuang untuk mengadu nasib mendapatkan pekerjaan dalam memperbaiki perekonomian keluarganya. Melihat bertambahnya jumlah angka kelulusan yang ingin mencari pekerjaan, merupakan salah satu permasalahan yang terjadi di setiap Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Maka dari itu banyaknya jumlah kelulusan dan pendatang yang ingin mengadu nasib di Provinsi Bali saat ini, menjadikan persaingan untuk mencari pekerjaan sangat ketat.

Menurut Guisan, dan Maria-Carmen (2010) yang menganalisis hubungan antara pengeluaran kesehatan, pendidikan dan beberapa indikator kesejahteraan manusia di Afrika dan Asia. Tujuannya adalah untuk menyarankan beberapa prioritas langkah yang ditujukan untuk meningkatkan kerjasama internasional dan kebijakan dalam negeri berhasil untuk meningkatkan pengeluaran kesehatan dan kualitas hidup sesuai dengan Milenium Tujuan Pembangunan (MDGs). Kesimpulannya menunjukkan bahwa cara utama untuk memperbaiki kesehatan Belanja adalah untuk meningkatkan pengeluaran untuk pendidikan. Felix (2012) berpendapat bahwa pemerintah daerah semestinya dapat mengalokasikan belanja modal yang lebih tinggi dibandingkan belanja rutin yang relatif kurang produktif. Jones dan Walker (2007), menyatakan bahwa jumlah pendapatan pemerintah daerah mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kekuatan keuangan pemerintah

daerah. Ogujiuba dan Abraham (2012) yang melakukan penelitian di Nigeria juga memperoleh hasil bahwa pendapatan dan pengeluaran sangat berkolerasi.

Fenomena yang menarik untuk dicermati khususnya di Provinsi Bali dilihat dari beberapa hasil penelitian terdahulu (Ayu *et al.*, 2014) dan Irvan (2015) yang menyatakan setiap daerah dalam melaksanakan pembangunan mengharapkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai dengan pemerataan, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat dapat dikaitkan dengan kesempatan kerja, karena dengan terciptanya kesempatan kerja yang banyak, maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan pada umumnya mengalami kenaikan, namun besarnya masih dibawah pengeluaran pemerintah pada sektor industri, perumahan dan pemukiman, serta sektor ekonomi lainnya. Jelas ini mesdeskripsikan bahwa pemerintah Indonesia masih kurang perhatian terhadap sektor pendidikan dan kesehatan.

Pembangunan manusia melalui sektor pendidikan turut dipertimbangkan, karena melalui pendidikan manusia mengalami sebuah proses. Proses tersebut dilalui oleh manusia untuk meningkatkan ilmu, pengetahuan, kemampuan/keahlian, meningkatkan harkat, martabat setiap individu. Pendidikan terlihat sebagai investasi sumber daya saat ini untuk mendapatkan *return* dimasa depan. Apabila kualitas sumber daya manusia tersebut rendah yang tercermin adalah tingkat pendidikan dan kesehatan yang rendah pula yang tentunya

berpengaruhjuga pada pembangunan manusia. Senada dengan pemikiran Schultz yang berpendapat bahwa pengetahuan dan skill adalah bentuk dari capital, yang akan menghasilkan *deliberate investment*. Investasi dalam pendidikan formal, training, dan kesehatan akan meningkatkan kesempatan dan pilihan bagi individu, yang akan mempengaruhi kemampuan masing-masing individu dalam mengembangkan potensi yang ada di dalam diri sehingga dapat meningkatkan kesempatan kerja. James J. Hecman (2005) menyatakan perlu adanya investasi pada modal manusia (*human capital investment*) namun, jika kebijakan ini diberlakukan, pasar modal untuk membiayai pendidikan perlu dikembangkan untuk mencegah siswa dari keluarga miskin tidak bersekolah.

Menurut Natasha Hamilton-Hart dan Günther G. Schulze (2016) Pertumbuhan ekonomi Indonesia naik sedikit pada pertengahan 2016 namun masih berada di bawah angka yang diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian suatu negara dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode berikutnya. Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo Klasik menyatakan pertumbuhan ekonomi bergantung pada perkembangan faktor-faktor produksi yaitu modal, tenaga kerja dan teknologi (Sukirno, 1994 : 456).

I Komang Oka Artana Yasa dan Sudarsana Arka (2015) berpendapat bahwa Pemerintah daerah dalam kebijakan pembangunan agar memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan agar tercipta suatu kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi akan mendorong pemerintah daerah untuk

melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Wahyuni, 2014).

Menurut Sukirno (2004) dalam analisis makro, tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara diukur dari perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai suatu negara/daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah diprosikan dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan total atas keseluruhan nilai barang dan jasa yang diperoleh dari seluruh kegiatan perekonomian yang dilakukan di daerah. Tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dihitung dengan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB digunakan sebagai ukuran penting yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi era otonomi daerah. PDRB perkapita merupakan nilai PDRB atas dasar harga berlaku dibagi jumlah penduduk disuatu daerah (KPPOD, 2003).

**Tabel 1 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Bali periode 2010-2016 (dalam persen)**

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Jembrana	4.37	5.31	5.57	5.38	5.98	6.08	6.12
Tabanan	5.37	5.58	5.29	6.03	6.39	6.89	6.99
Badung	6.08	6.27	6.81	6.41	6.97	7.00	7.09
Gianyar	12.46	9.63	11.04	6.43	6.80	6.89	6.98
Klungkung	5.15	5.49	5.69	5.71	6.05	6.85	6,90
Bangli	4.74	5.52	5.65	5.61	5.83	5.93	6.03
Karangasem	4.85	4.93	5.42	5.81	6.16	6.76	6.16
Buleleng	5.53	5.76	6.12	6.71	6.96	6.96	6.06
Denpasar	6.17	6.34	6.70	6.54	7.00	7.10	7.20

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017

Tabel 1. menunjukkan pertumbuhan ekonomi Bali sampai tahun 2016 rata-rata telah mencapai angka 6 (enam) persen. Kondisi ini tentunya cukup

mengembirakan ditengah suansana krisis yang masih berlangsung sampai saat ini. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa krisis yang berlangsung juga mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun ini. Sampai tahun 2016 kabupatn/kota yang memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Kota Denpasar yaitu mencapai 7,00. Hal ini terjadi karena kota Denpasar merupakan pusat kota yang memiliki karakteristik dengan jumlah penduduk yang tinggi.

Pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh komponen ekonomi makro, yakni pengeluaran pemerintah yaitu belanja daerah. Menurut Sayekti (2009) Kebijakan distribusi pengeluaran pemerintah yang tepat sasaran dan ketepatan arah investasi ke daerah-daerah yang dapat menciptakan kesempatan kerja akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi apabila distribusi pengeluaran pemerintah belum dapat dilakukan secara merata maka ketimpangan pendapatan kabupaten/kota tetap akan terjadi dan cenderung meningkat dan tidak lagi memberi ruang untuk masyarakat terutama berpenghasilan rendah ikut ambil bagian dalam proses pembangunan.

Penelitian yang dilakukan Hariawan Peggy Dan Ayu Swaningrum (2015) ditemukan angka PDRB per kapita dan variabel tenaga kerja berpengaruh positif terhadap IPM. Kusuma Hendra (2016) menyimpulkan bahwa desentralisasi fiskal di Indonesia telah berdampak pada pertumbuhan ekonomi terutama dari kontribusi belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Hutajulu Halomoan dkk (2012) menunjukkan secara umum manajemen keuangan di Kabupaten Jayapura berjalan kurang efektif. Disamping itu nilai kontribusi neraca keuangan pada pendapatan nasional menunjukkan adanya ketergantungan yang tinggi dari

perimbangan pendapatan. Penelitian yang dilakukan Muhammad Fajri, Arman Delis Dan Yohanes Vyn Amzar (2016) mengatakan pengaruh otonomi fiskal terhadap ketimpangan wilayah di Sumatera berpengaruh negatif dan signifikan. Diharapkan pemerintah tingkat Provinsi di Sumatera mengoptimalkan PAD untuk mengatasi ketimpangan wilayah.

Adipuryanti dan Sudibia (2015) adanya perbedaan pertumbuhan ekonomi antar daerah akan menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan. Ketimpangan distribusi pendapatan dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya tidak meratanya jumlah tenaga kerja dan investasi pada suatu daerah. Rustariyuni (2012) menyatakan bahwa perwujudan *Good Governance*, dengan melibatkan masyarakat dan swasta sebagai mitra dalam pelaksanaan pembangunan serta transparansi dibidang pemerintahan akan menjaga tercapainya angka indeks pembangunan manusia di seluruh wilayah Provinsi Bali. Modal manusia merupakan salah satu sumberdaya yang dapat menghasilkan barang dan jasa. Modal manusia sebagai suatu konsep mempunyai arti multi dimensi menurut kepentingan yang menggunakannya. Demikian pula, modal manusia lebih merupakan modal fisik yang paling tua di dunia yang melekat pada diri manusia yang memilikinya dan sudah tercipta sejak manusia dilahirkan. Modal manusia memiliki arti yang lebih sempit daripada sumberdaya manusia, karena lebih banyak mengukur manfaat dari sisi ekonomi saja (Bendes, 2014).

Nabeela *et al.* (2012) meneliti tentang dampak belanja pemerintah di berbagai sektor ekonomi terhadap pengurangan kemiskinan menggunakan data tahunan seri waktu untuk periode 1972 sampai 2008, untuk menganalisis dampak

jangka panjang dari pengeluaran pemerintah dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi dan layanan masyarakat, defisit anggaran dan undang-undang dan ketertiban pengentasan kemiskinan dengan menggunakan pengembangan ekonometrik baru-baru ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pemerintah untuk pendidikan dan hukum dan ketertiban berkontribusi secara signifikan pengurangan kemiskinan sementara belanja pemerintah untuk defisit anggaran dan layanan ekonomi dan masyarakat tampaknya bertanggung jawab atas kemiskinan di Pakistan.

Menurut Blane D. Lewis (2006) Pemerintah daerah di Indonesia mengelola pajak secara tidak efisien. Biaya rata – rata administrasi perpajakan setempat sebagai persentase dari pendapatan yang dihasilkan diperkirakan lebih dari 50 persen. Namun ada variasi inefisiensi administratif yang luas pada pemerintah daerah. Christian von Luebke (2009) berpendapat bahwa tekanan sisi permintaan dari perusahaan lokal, asosiasi dan dewan distrik kurang signifikan dari pada tekanan sisi penawaran dari pemimpin pemerintah daerah dalam menjelaskan variasi perpajakan, praktik perizinan dan praktik korupsi.

Pesatnya pembangunan daerah yang menyangkut perkembangan kegiatan fiskal yang membutuhkan alokasi dana dari pemerintah daerah mengakibatkan pembiayaan pada belanja pemerintah daerah yang terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan membutuhkan tersedianya dana yang besar pula untuk membiayai kegiatan tersebut. Belanja (pengeluaran) pemerintah daerah oleh pemerintah daerah dilaporkan dalam APBD merupakan kegiatan rutin pengeluaran kas daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasi dalam

pemerintahan. Dengan belanja yang semakin meningkat maka dibutuhkan danayang besar pula agar belanja untuk kebutuhan pemerintah daerah dapat terpenuhi. Dengan terpenuhinya kebutuhan belanja pemerintah, maka diharapkan pelayanan terhadap masyarakat menjadi lebih baik dan kesejahteraan masyarakat menjadi meningkat.

Belanja daerah merupakan pengalokasian dana yang harus dilakukan secara efektif dan efisien, di mana belanja daerah dapat menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan kewenangan daerah. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah dituntut untuk mengelola keuangan daerah secara baik dan efektif. Perkembangan belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dapat dilihat pada Tabel 1.2 sebagai berikut.

**Tabel 2 Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali periode 2010-2016 (Dalam Ribuan Rupiah)**

Kabupaten/ Kota	Belanja Daerah (Dalam Ribuan Rupiah)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Jembrana	496307	546848	664723	718538	786285	885633	5313798
Tabanan	813535	882459	1065536	1198702	1333200	1586227	9517362
Badung	1319058	1572210	2334080	2755459	3276164	3446643	20679858
Gianyar	754075	903930	1006500	1192027	1354851	1504436	9026616
Kelungkung	441999	494903	589898	665548	783124	890952	5345712
Bangli	470699	574903	592232	652343	762376	899776	5398656
Karangasem	657929	801321	942886	1078485	1164666	1351846	8111076
Buleleng	837540	1038052	1123510	1413380	1558960	1865996	11195976
Denpasar	938613	1100129	1309529	1537883	1648378	1757644	105545864
Bali	1985850	2537727	3562732	3868740	4491645	4499030	5420933529

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017

Tabel 2. rata – rata belanja daerah di kabupaten/kota di Provinsi Bali mengalami peningkatan dari tahun 2010-2015. Belanja daerah menarik untuk diteliti karena belanja daerah tiap daerah berbeda-beda, selain itu belanja daerah yang dilakukan pemerintah dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat dan diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya belanja

daerah memengaruhi pertumbuhan ekonomi. kondisi ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Lin dan Liu pada tahun 2000 yang menyatakan bahwa desentralisasi fiskal memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan kata lain desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut penelitian yang dilakukan Wong (2004) pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang sebenarnya menghasilkan peningkatan kapasitas pendapatan pemerintah daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga mencerminkan semakin besarnya kebutuhan layanan jasa pemerintah, sehingga dibutuhkan anggaran pemerintah yang semakin besar pula.

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang produksi, untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian yang berasal dari investasi dalam negeri. Hasil penelitiannya bahwa, PMDN mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional jangka pendek, namun tidak dalam jangka panjang (Sodik dan Nuryadin, 2005). Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) memainkan peranan penting dalam menentukan jumlah output dan pendapatan. Perkembangan PMDN pada Kota/Kabupaten di Provinsi Bali dapat dilihat pada Tabel 3. sebagai berikut.

**Tabel 3 Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri di Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010-2016 (Dalam Juta Rupiah)**

Kabupaten/kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Jembrana</b>	67.183	239.990	103.631	80.267	81.207	191.799	4.652.613
<b>Tabanan</b>	667.977	1 141.259	734.409	108.928	109.008	178.116	4.397.145
<b>Badung</b>	2.868	1 743.362	3.098.820	3.126.279	3.136.1079	2.967.016	517.536
<b>Gianyar</b>	43.652	1 081.182	150.927	1.134.498	1.143.198	1.065.721	810.558
<b>Klungkung</b>	260.037	178.342	53.487	23.954	24.8954	118.145	409.229
<b>Bangli</b>	31.818	26.058	31.479	21.252	22.402	30.780	15.652
<b>Karangasem</b>	60.407	45.528	74.664	163.429	174.569	92.344	1.015.270
<b>Buleleng</b>	266.716	109.615	393.575	201.727	212.897	337.596	212.579
<b>Denpasar</b>	1 250.704	2 749.143	2 965.371	2 932.781	2 952.999	14.026.153	27.058

Sumber : Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali, 2016

Pada Tabel 3. menunjukkan bahwa dari 9 (sembilan) kabupaten/kota di Provinsi Bali pada tahun 2010-2016 PMDN mengalami fluktuasi. Kabupaten dengan pertumbuhan investasi positif adalah di Kabupaten Badung. Selama 5 tahun terakhir PMDN kabupaten Badung selalu meningkat dari tahun ke tahun, begitu juga dengan total PMDN di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali selalu meningkat dari tahun 2010-2016.

Almfraji, Almsafir, Liu Yao (2014) juga menemukan hasil bahwa investasi asing (PMA) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini juga didukung oleh penelitian Samuel Adams (2009) yang menganalisis dampak dari investasi asing dan investasi domestik terhadap pertumbuhan ekonomi di Sub-Saharan Africa selama 1990-2003. Jumlah Negara yang diteliti yaitu 42 negara di Sub-Saharan Afrika. Hasil penelitian bahwa investasi domestik berpengaruh signifikan pada pertumbuhan ekonomi.

**Tabel 4 Realisasi Penanaman Modal Asing di Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010-2016 (Dalam Juta Rupiah)**

Kabupaten/ Kota	Penanaman Modal Asing (dalam ribuan rupiah)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Jembrana	-	10829	1860	1395	1505	-	2413195
Tabanan	238895	25643	54349	331912	3451872	267294	901409
Badung	2626328	1430453	4081991	3021220	3341000	3362385	107353
Gianyar	2360	79848	180015	95897	97998	151415	-
Kelungkung	-	1001	1853	4937	4989	29831	150743
Bangli	1556	2093	140	140	151	-	-
Karangasem	1239098	590017	50035	23547	24008	77609	70835
Buleleng	17019	2058869	70829	60483	61338	1237715	207068
Denpasar	84905	188218	37693	95443	96234	1702645	139373

Sumber : Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali, 2017

Penanaman Modal Asing selama periode tahun 2010 sampai 2016 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2011 investasi pemerintah mengalami peningkatan dua kali lipat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 897.649 Juta. Tetapi di tahun 2013 investasi yang dilakukan oleh pemerintah mengalami penurunan menjadi Rp. 735.614 Juta. Hal ini terjadi karena terjadinya ketidakstabilan politik. Pada saat ini keadaan politik sedang memanas menjelang pemilu 2014.

Menurut Chukwunonso Gerald Iheoma (2014) Fokus mendasar dari pembangunan ekonomi adalah pengembangan pribadi manusia, dan selama bertahun-tahun, ada telah menjadi konsensus umum di kalangan ekonom pembangunan tentang keefektifan layanan sosial dalam mencapai tujuan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya kesehatan masyarakat dan Belanja pendidikan tersier sangat penting dalam menjelaskan perkembangan manusia di negara-negara ini. Belanja kesehatan swasta serta pengeluaran pendidikan dasar dan menengah ternyata tidak signifikan. Dengan demikian, dianjurkan agar di untuk memastikan kelanjutan pembangunan modal manusia di negara negara ini, meningkatkan pendanaan publik untuk kesehatan sektor perlu. Selanjutnya,

menjamin pemanfaatan alokasi anggaran sektor pendidikan yang memadai terutama untuk sub sektor pendidikan primer dan menengah, dan meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas layanan pendidikan terutama bagi kaum miskin kota dan penduduk pedesaan akan memperbaiki keefektifan sub-sektor tersebut dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM).

Richardson (2014) menganalisis dampak pengeluaran sektoral terhadap pembangunan manusia di Nigeria dengan menggunakan data dari 20 negara bagian untuk periode 1999-2012. Data masing-masing negara dihasilkan dari berbagai isu Laporan Akuntan-Jenderal, Laporan Tahunan Bank Sentral Nigeria dan Laporan Akun dan Laporan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Untuk ketahanan analisis, pengeluaran total, berulang dan belanja modal untuk pendidikan, kesehatan, pertanian, pembangunan pedesaan, energi, perumahan, perlindungan lingkungan dan sumber air portabel digunakan sebagai prediktor pembangunan manusia. Hasilnya menggambarkan bahwa ada hubungan fungsional positif antara pendidikan, kesehatan, pertanian, pembangunan pedesaan, energi, perumahan, perlindungan lingkungan dan pengeluaran sumber daya air portabel dan pembangunan manusia. Sebuah indikasi bahwa pengeluaran untuk sektor-sektor ini mendorong perkembangan manusia.

Pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditingkatkan melalui pengeluaran pemerintah daerah maupun investasi tetapi juga perlu adanya peningkatan terhadap IPM. Meningkatkan IPM tidak semata-mata hanya pada pertumbuhan ekonomi, namun pembangunan dari segala aspek (Ardiansyah dan Widiyaningsih, 2014). Agar pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pembangunan manusia, maka

perlu disertai dengan pembangunan yang merata. Dengan adanya pemerataan pembangunan, maka adanya jaminan bahwa semua penduduk merasakan hasil-hasil pembangunan tersebut. Pendekatan pembangunan manusia tidak semata-mata menjadi sebuah tujuan, namun merupakan sebuah proses. Secara spesifik, UNDP menetapkan empat elemen utama dalam pembangunan manusia, yaitu pemerataan (*equity*), produktivitas (*productivity*), pemberdayaan (*empowerment*) dan kesinambungan (*sustainability*) (Ardiansyah dan Widyaningsih, 2014).

**Tabel 5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Metode Baru  
Perkabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2010-2015 (Dalam Persen)**

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Jembrana	72,69	73,18	73,62	74,29	75,19	69,66	70,38
Tabanan	74,57	75,24	75,55	76,19	77,29	73,54	74,19
Badung	75,02	75,35	75,69	76,37	77,27	78,86	79,80
Gianyar	72,73	73,43	74,49	75,02	76,35	75,03	75,70
Klungkung	70,54	71,02	71,76	72,25	73,05	68,98	69,31
Bangli	70,71	71,42	71,80	72,28	73,09	66,24	67,03
Karangasem	66,42	67,07	67,83	68,47	69,16	64,68	65,23
Buleleng	70,69	71,12	71,93	72,54	73,34	70,03	70,65
Denpasar	77,94	78,31	78,80	79,41	79,89	82,24	82,58

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bali, 2015

Perkembangan IPM mencerminkan tingkat kesejahteraan yang rasakan oleh masyarakat. Meskipun demikian namun tinggi atau rendahnya tingkat IPM belum tentu mampu menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat. Pada Tabel 3. dapat diketahui angka dari masing-masing komponen IPM, dimana IPM dari seluruh kabupaten/kota Provinsi Bali pada tahun 2010-2016 selalu mengalami peningkatan. Bali pada tahun 2010- 2016 tergolong dalam tahap menengah atas antara 66-79,9. Tingkat IPM akan dipengaruhi oleh tingkat PAD sebagai sumber pembiayaan daerah.

Perkembangan kesejahteraan masyarakat merupakan suatu hal yang penting dalam proses perencanaan pembangunan. Beberapa indikator tingkat

kesejahteraan yang telah dikembangkan sebagai dasar dalam mengamati pola kesenjangan masyarakat antar daerah. Saat ini penggunaan indeks pembangunan manusia (IPM) sebagai indikator kesejahteraan memperoleh penerimaan secara luas di seluruh dunia, bahkan telah memperoleh penerimaan pada tingkat daerah. Pembangunan manusia dapat diartikan sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan bagi pemenuhan kebutuhan dasar manusia dari sisi daya beli, kesehatan maupun pendidikan (Nehen, 2012:82).

Sebagai alat ukur komposit dalam satu angka, IPM mengandung beberapa keterbatasan dalam penggunaannya. Pertama, karena merupakan hasil akhir dari serangkaian program di berbagai bidang, IPM kurang dapat merefleksikan pencapaian sasaran program yang lebih berdimensi pemberdayaan manusia yang mendasar. Oleh karena itu, IPM tepat bila dipakai untuk alat perencanaan bila didukung indikator tunggal dari berbagai sektor pembangunan. Dengan demikian IPM sangat berguna dalam meningkatkan kesadaran (*raising awareness*) bagi perumus dan pengambil kebijakan pembangunan.

Dengan meningkatnya IPM tiap tahunnya maka dapat meningkatkan kesempatan kerja. Menurut Simanjuntak (1998), kesempatan kerja dapat diartikan sebagai sejumlah orang atau kelompok orang yang sedang memiliki kegiatan bekerja. Lebih jelasnya, bahwa yang dimaksud kesempatan kerja adalah penduduk berusia 10 tahun keatas yang tertampung atau terserap di seluruh lapangan usaha. Dengan demikian yang dimaksud kesempatan kerja, sama dengan besaran/jumlah penduduk yang bekerja. Suatu kondisi yang sangat penting dalam proses pembangunan adalah semakin meluasnya kesempatan kerja. Pembangunan

ekonomi seharusnya membawa partisipasi aktif dalam kegiatan yang bersifat produktif oleh semua anggota masyarakat yang mampu berperan serta dalam proses ekonomi, partisipasi aktif dari masyarakat ini dapat ditunjukkan dalam pendapatan perkapita yang ada dalam suatu daerah, apakah pendapatan perkapitanya tinggi atau rendah. pendapatan perkapita yang tinggi menunjukkan tingkat kemakmuran sedangkan pendapatan perkapita yang rendah menunjukkan tingkat kemakmuran yang kurang.

Santi Nurmainah (2013) yang melakukan penelitian tentang Analisis Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah, Tenaga Kerja Terserap dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan menunjukkan bahwa keempat hipotesis yang diajukan diterima dan hipotesis ditolak. Hipotesis 1 menyatakan bahwa belanja modal pemerintah daerah berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hipotesis 2 menyatakan bahwa penyerapan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hipotesis 3 menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hipotesis 4 menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Hipotesis 5 menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia adalah efek signifikan negatif terhadap kemiskinan.

Menurut (Meylina Astri *et al.*, 2013) menunjukkan adanya pengaruh pengeluaran pemerintah daerah pada sektor pendidikan dan kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia secara serempak Kesimpulan yang sama terjadi

pada uji signifikansi dan nilai sig. terdapat pengaruh pengeluaran pemerintah daerah pada sektor pendidikan dan kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Untuk uji t, dari hasil perhitungan dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel pengeluaran pemerintah daerah pada sektor pendidikan berpengaruh pada IPM, namun pengeluaran pemerintah daerah pada sektor kesehatan tidak berpengaruh pada IPM.

Provinsi Bali sebagai salah satu daerah yang ada di Indonesia dan ikut melaksanakan otonomi daerah, sangat serius mendorong pertumbuhan ekonomi daerahnya. Pengembangan perekonomian di setiap daerah akibat adanya otonomi daerah juga memacu perkembangan perekonomian di Provinsi Bali. Selain laju pertumbuhan yang semakin meningkat, laju kesempatan kerja di Provinsi Bali juga mengalami penambahan dari tahun ke tahun. Namun fenomena yang terjadi masih terdapatnya kesenjangan pertumbuhan ekonomi antara kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui pengaruh langsung belanja daerah dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota Provinsi Bali, untuk mengetahui pengaruh langsung belanja daerah dan investasi terhadap kesejahteraan masyarakat pada Kabupaten/Kota Provinsi Bali, serta untuk mengetahui pengaruh tidak langsung belanja daerah dan investasi terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

Penelitian tentang penyerapan tenaga kerja sudah banyak dilakukan oleh para ahli ekonomi, kalangan akademis dan para mahasiswa. Dari sekian banyak

penelitian tersebut, penulis akan mengacu pada hasil penelitian. Deddy Rustiono (2008) yang melakukan penelitian tentang analisis pengaruh angkatan kerja, investasi, realisasi PMA, realisasi PMDN dan belanja pemerintah daerah terhadap PDRB Propinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 1985-2006. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa angkatan kerja, investasi swasta (PMA dan PMDN) dan belanja pemerintah daerah memberi dampak positif terhadap perkembangan PDRB Propinsi Jawa Tengah. Krisis ekonomi menyebabkan perbedaan yang nyata kondisi antara sebelum dan sesudah krisis dan memberi arah yang negatif. Sebagai upaya meningkatkan PDRB Propinsi Jawa Tengah maka diperlukan kebijakan mendorong minat berinvestasi di daerah. Pengembangan usaha sebaiknya diarahkan pada kegiatan yang bersifat padat karya agar mampu menyerap tenaga kerja sebanyak mungkin. Pada akhirnya peran pemerintah daerah melalui pengeluaran pemerintah yang dapat merangsang peningkatan variabel investasi dan penyerapan angkatan kerja diharapkan mampu meningkatkan kegiatan ekonomi daerah guna tercapainya pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan perkapita masyarakat.

Santi Nurmainah (2013) yang melakukan penelitian tentang Analisis Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah, Tenaga Kerja Terserap dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan menunjukkan bahwa keempat hipotesis yang diajukan diterima dan hipotesis ditolak. Hipotesis 1 menyatakan bahwa belanja modal pemerintah daerah berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hipotesis 2 menyatakan bahwa penyerapan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan

terhadap pertumbuhan ekonomi. Hipotesis 3 menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hipotesis 4 menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Hipotesis 5 menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia adalah efek signifikan negatif terhadap kemiskinan.

Menurut Meylina Astri *et al.* (2013) menunjukkan adanya pengaruh pengeluaran pemerintah daerah pada sektor pendidikan dan kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia secara serempak. Kesimpulan yang sama terjadi pada uji signifikansi dan nilai sig. terdapat pengaruh pengeluaran pemerintah daerah pada sektor pendidikan dan kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Untuk uji t, dari hasil perhitungan dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel pengeluaran pemerintah daerah pada sektor pendidikan berpengaruh pada IPM, namun pengeluaran pemerintah daerah pada sektor kesehatan tidak berpengaruh pada IPM.

Berdasarkan pada rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kajian-kajian teori yang relevan ataupun hasil penelitian sebelumnya maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1). Belanja Daerah dan Investasi secara langsung berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali; 2). Belanja Daerah, Investasi secara langsung berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali; 3). Belanja Daerah dan Investasi secara tidak langsung berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat melalui Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian dilakukan pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Bali. Sasaran penelitian ini difokuskan untuk mengetahui Pengaruh Belanja Daerah, investasi terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali. Pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi. Data-data ini diperoleh langsung melalui pustaka tercetak yang ada pada Bappeda dan Badan Pusat Statistik Provinsi Bali periode 2010-2016. Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan memperhatikan ketersediaan data periode yang memberikan gambaran terbaru, serta periode yang relevan dengan keadaan sekarang.

Obyek dari penelitian ini mengambil lokasi di kabupaten/kota di Provinsi Bali. Dipilihnya lokasi ini karena Provinsi Bali masih memiliki ketimpangan antar daerahnya sehingga kesejahteraan masyarakat Bali masih belum sepenuhnya dapat dirasakan secara merata. Obyek dari penelitian ini berfokus pada pengaruh masing-masing variabel belanja daerah, investasi terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali pada kurun waktu 2010-2016. Obyek penelitian dengan kurun waktu dari 2010-2016 dikarenakan pada tahun-tahun tersebut terjadinya peningkatan ataupun penurunan yang signifikan pada masing-masing variabel.

Definisi operasional masing-masing variabel yakni belanja daerah dalam penelitaian ini adalah belanja yang dibagi-bagi ke Pemerintah Daerah, untuk kemudian masuk dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) di masing-masing daerah di Provinisi Bali selama periode 2010-2016 yang dinyatakan dalam

ribuan rupiah. Investasi pada penelitian ini adalah investasi atau penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang bersumber dari pihak swasta di Kabupaten/Kota Provinsi Bali, selama periode 2010-2016 yang dinyatakan dalam ribuan rupiah. Indeks pembangunan manusia (IPM) dalam penelitian ini yaitu suatu pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan, daya beli masyarakat dan standar hidup selama periode 2010-2016 yang dinyatakan dalam persen. Pertumbuhan Ekonomi merupakan proses kenaikan output per kapita yang di proyeksikan dengan pertumbuhan PDRB perkapita Kabupaten/Kota di Provinsi Bali atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha periode 2010-2016 dalam satuan persen.

Teknik analisis yang digunakan yakni Analisis Jalur serta Uji Sobel. Koefisien jalur dilihat dengan membuat persamaan sebagai berikut:

$$Y_1 = b_1X_1 + b_2X_2 + e_1 \dots\dots\dots (1)$$

$$Y_2 = b_3X_1 + b_4X_2 + b_5Y_1 + e_2 \dots\dots\dots (2)$$

Keterangan:

- $Y_2$  = kesejahteraan masyarakat (IPM)
- $Y_1$  = pertumbuhan ekonomi
- $X_2$  = investasi
- $X_1$  = belanja daerah
- $b_1$ - $b_5$  = Koefisien regresi
- $e_1$ ,  $e_2$  = error term, nilai kesalahan observasi diasumsikan nol

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara administrasi Provinsi Bali terbagi menjadi 9 kabupaten/kota, 57 kecamatan, 715 desa/kelurahan, 1.482 desa pakraman (desa adat), dan 1.604 subak sawah serta 1.107 subak abian. Provinsi Bali merupakan salah satu dari 34 Provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah hanya 0,29 persen dari luas

wilayah Indonesia. Secara astronomis, Provinsi terletak pada posisi titik koordinat  $08^{\circ}03'40''$ -  $08^{\circ}50'48''$  Lintang Selatan dan  $114^{\circ}25'53''$ -  $115^{\circ}42'40''$  Bujur Timur yang membuatnya beriklim tropis layaknya wilayah lain di Indonesia. Diantara kesembilan kabupaten/kota tersebut, Kabupaten Buleleng memiliki luas terbesar 1.365,88 km<sup>2</sup> (24,23%) dari luas provinsi, diikuti oleh Jembrana 841,80 km<sup>2</sup> (14,93%), Karangasem 839,54 km<sup>2</sup> (14,89%), dan Tabanan 839,33 km<sup>2</sup> (14,89%). Sisanya berturut-turut adalah Bangli 520,81 km<sup>2</sup>, Badung 418,52 km<sup>2</sup>, Gianyar 368,00 km<sup>2</sup>, Klungkung 315,00 km<sup>2</sup>, dan Kota Denpasar 127,78 km<sup>2</sup>.

Perkembangan Provinsi Bali yang sangat pesat mampu menyedot jumlah wisatawan yang datang ke Bali, yang berdampak pada jumlah kamar yang terjual setiap tahunnya juga semakin meningkat. Hal ini juga mempengaruhi banyak tujuan wisata semakin ramai dikunjungi. Untuk menunjang perkembangan tersebut, diperlukan penunjang akomodasi yang mendukung agar para wisatawan lebih lama tinggal di daerah tujuan wisata dan akan membelanjakan uangnya lebih banyak. Penunjang akomodasi pariwisata tersebut, meliputi : hotel, restoran/rumah makan, *travel agent* dan lain sebagainya. Salah satu yang terpenting adalah adanya penginapan yang cukup memadai. Provinsi Bali memiliki banyak hotel yang tersebar, baik itu hotel berbintang maupun tidak berbintang, yang memiliki berbagai macam jenis kamar yang ditawarkan oleh hotel.

Statistik deskriptif dalam penelitian ini disajikan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel-variabel penelitian, antara lain minimum, maksimum, *mean*, dan standar deviasi. Pengukuran rata-rata (*mean*)

merupakan cara yang paling umum digunakan untuk mengukur nilai sentral dari suatu distribusi data. Sedangkan, standar deviasi merupakan perbedaan nilai data yang diteliti dengan nilai rata-ratanya. Hasil statistik deskriptif dapat dilihat pada Tabel 6. yaitu sebagai berikut:

**Tabel 6 Hasil Statistik Deskriptif**

	<b>N</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Mean</b>	<b>Std. Deviation</b>
X <sub>1</sub>	63	441999,00	1E+,007	2118102	2230330
X <sub>2</sub>	63	2868,00	14023285,00	1142894,70	1986381,25
Y <sub>1</sub>	63	4,74	7,10	6,1675	,57217
Y <sub>2</sub>	63	64,68	82,24	73,2137	3,34574
Valid N (listwise)	63				

*Sumber:* Data diolah, 2018

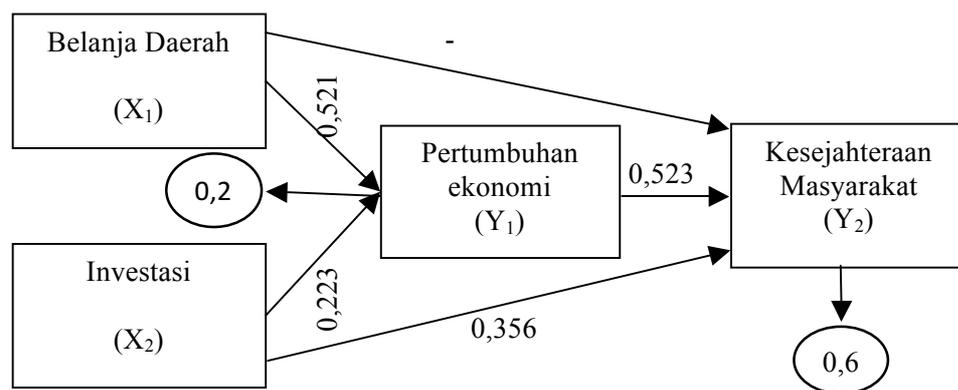
Belanja daerah (X<sub>1</sub>) menunjukkan nilai minimum adalah Rp 441.999,00 (dalam ribu rupiah) dan nilai maksimumnya adalah Rp 10.000.000 (dalam ribu rupiah). Mean untuk pendapatan asli daerah adalah Rp 2.118.102 (dalam ribu rupiah), hal ini berarti rata-rata pendapatan asli daerah sebesar Rp 2.118.102. Standar deviasinya 2.230.330. Investasi (X<sub>2</sub>) menunjukkan nilai minimum adalah Rp 2.868,00 (dalam ribu rupiah) dan nilai maksimumnya adalah Rp 14.023.285,00 (dalam ribu rupiah). Mean untuk Investasi adalah Rp 1.142.894,70 (dalam ribu rupiah), hal ini berarti rata-rata Investasi sebesar Rp 1.142.894,70. Standar deviasinya 1.986.381,25.

Pertumbuhan ekonomi (Y<sub>1</sub>) menunjukkan nilai minimum adalah 4,74 (dalam persen) dan nilai maksimumnya adalah 7,10 (dalam persen). Mean untuk belanja modal adalah 6,1675 (dalam persen), hal ini berarti rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 6,1675 (dalam persen). Standar deviasinya 0,57217. IPM (Y<sub>2</sub>) menunjukkan nilai minimum adalah 64,68 dan nilai maksimumnya adalah 82,24.

Mean untuk IPM adalah 73,21, hal ini berarti rata-rata IPM sebesar 73,21. Standar deviasinya 3,34574.

Pengujian data pada penelitian ini menggunakan analisis jalur (*path analysis*) guna menguji pola hubungan yang mengungkapkan pengaruh variabel atau seperangkat variabel terhadap variabel lainnya, baik pengaruh langsung maupun pengaruh tidak langsung. Secara teoritis, hubungan antar variabel dapat dibuat model dalam bentuk diagram *path*, sebagai berikut.

**Gambar 1 Model Jalur Hubungan Variabel Belanja Daerah, Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat.**



Sumber : Data diolah peneliti, 2017

Model tersebut juga dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan, sehingga membentuk sistem persamaan berikut.

$$Y_1 = 0,521 X_1 + 0,225 X_2 + e_1 \dots \dots \dots (3)$$

Berdasarkan perhitungan di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat pengaruh langsung antara variabel Belanja Daerah (X<sub>1</sub>) dan Investasi terhadap pertumbuhan ekonomi (Y<sub>1</sub>). Kondisi tersebut dapat dijelaskan dengan standar koefisien beta sebesar 0,513 dengan taraf signifikan sebesar 0,000 < 0,005 dan variabel Investasi (X<sub>2</sub>) sebesar 0,225 dengan taraf signifikan 0,047 < 0,005.

$$Y_2 = -0,513X_1 + 0,356 X_2 + 0,523Y_1 + e_2 \dots \dots \dots (4)$$

Berdasarkan perhitungan di atas dapat dijelaskan bahwa tidak langsung antara variabel Belanja Daerah ( $X_1$ ) dan Investasi ( $X_2$ ) terhadap Kesejahteraan Masyarakat ( $Y_1$ ) melalui Pertumbuhan Ekonomi ( $Y_1$ ). Kondisi tersebut dapat di jelaskan dengan standar koefisien beta Belanja Daerah ( $X_1$ ) sebesar -0,513 dengan taraf signifikan  $0,001 < 0,005$ , variabel Investasi ( $X_2$ ) sebesar 0,356 dengan taraf signifikan  $0,006 < 0,005$ , dan variabel Pertumbuhan Ekonomi ( $Y_1$ ) memiliki standar koefisien beta sebesar 0,523 dengan taraf signifikan  $0,001 < 0,005$ .

Berdasarkan Gambar 2. dapat dihitung pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung dan pengaruh total antar variabel sebagai berikut.

**Tabel 7 Hasil Pengaruh Langsung, Pengaruh Tidak Langsung dan Pengaruh Total Antar Variabel**

Hubungan Variabel	Pengaruh		Total
	Langsung	Tidak Langsung	
$X_1 \rightarrow Y_1$	0,521		0,521
$X_2 \rightarrow Y_1$	0,225		0,223
$X_1 \rightarrow Y_2$	-,513	0,272483	-0,240517
$X_2 \rightarrow Y_2$	0,356	0,117675	0,473576
$Y_1 \rightarrow Y_2$	0,523		0,523

Sumber : Data diolah, 2018

Keterangan :

- PL : Pengaruh Langasung
- PTL : Pengaruh Tidak Langsung
- TP : Total Pengaruh
- $X_1$  : Belanja Daerah
- $X_2$  : Investasi
- $Y_1$  : Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)
- $Y_2$  : Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan Tabel 7. pengaruh langsung variabel  $X_1$  terhadap variabel  $Y_1$  adalah 0,521. Tidak terdapat pengaruh tidak langsung sehingga pengaruh totalnya

adalah 0,521. Pengaruh langsung variabel  $X_1$  terhadap variabel  $Y_2$  adalah -0,513. Pengaruh tidak langsung variabel  $X_1$  terhadap  $Y_2$  melalui  $Y_1$  diperoleh dari  $0,521 \times 0,523 = 0,272483$ . Oleh karena itu, pengaruh total variabel  $X_1$  terhadap variabel  $Y_2$  melalui  $Y_1$  adalah sebesar  $-0,513 + -0,272483 = -0,240517$ .

Pengaruh langsung variabel  $X_2$  terhadap  $Y_1$  adalah 0,223. Tidak terdapat pengaruh tidak langsung sehingga pengaruh totalnya adalah 0,225. Pengaruh langsung variabel  $X_2$  terhadap variabel  $Y_2$  adalah 0,356. Pengaruh tidak langsung variabel  $X_2$  terhadap variabel  $Y_2$  melalui  $Y_1$  adalah  $0,225 \times 0,523 = 0,117675$ . Oleh karena itu, pengaruh total  $X_2$  terhadap  $Y_2$  melalui  $Y_1$  adalah sebesar  $0,356 + 0,116629 = 0,473576$ .

Untuk menguji variabel mediator yang memediasi hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas dapat dilakukan dengan uji sobel Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh taraf signifikansi penelitian untuk variabel belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi  $1384,138 < 1,96$ . Artinya belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi memang benar memediasi belanja daerah terhadap kesejahteraan masyarakat, maka keadaan ini disebut *partial mediation*.

Hasil yang diperoleh dengan nilai koefisien regresi yang bertanda positif dan signifikan, temuan tersebut menandakan bahwa semakin tinggi belanja daerah maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Secara tradisional, pertumbuhan ekonomi ditunjukkan untuk peningkatan yang berkelanjutan (PDRB). Desentralisasi memberikan dampak yang sangat berarti bagi pertumbuhan

ekonomi. Kondisi ini menyatakan bahwa, pemberian otonomi daerah yang lebih besar akan memberikan dampak yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh taraf signifikansi penelitian untuk variabel investasi terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi  $338,197 < 1,96$ . Artinya investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi memang benar memediasi investasi terhadap kesejahteraan masyarakat, maka keadaan ini disebut *partial mediation*.

Hasil yang diperoleh dengan nilai koefisien regresi positif dan signifikan, temuan tersebut menandakan bahwa semakin tinggi investasi maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi. Kondisi tersebut menyatakan bahwa pengaruh investasi terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi berjalan searah, artinya kenaikan investasi diikuti dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi, akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau sebaliknya. Dengan berpengaruhnya investasi secara positif dan signifikan juga dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat Pada Kabupaten/Kota Provinsi Bali semakin meningkat.

#### **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1). Belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Investasi berpengaruh positif dan signifikan secara

langsung terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota Provinsi Bali; 2). Belanja daerah tidak berpengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat pada Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Dan investasi berpengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota Provinsi Bali; 3). Belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Investasi berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota Provinsi Bali, jadi pertumbuhan ekonomi memang benar memediasi belanja daerah dan investasi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Adapun saran yang dapat diberikan berkenaan dengan penelitian selanjutnya sebagai pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali harus lebih memperhatikan investasi dalam negeri dan anggaran yang dikeluarkan baik disektor pendidikan maupun di sektor kesehatan agar anggaran yang dikeluarkan dapat terdistribusi dengan baik. Pemerintah harus memperhatikan tingkat pendidikan yang merupakan faktor penting dalam menunjang pembangunan nasional. Tingginya pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan akan berpengaruh terhadap perkembangan di sektor pendidikan yaitu dengan meningkatnya jumlah murid yang mampu menyelesaikan sekolahnya sampai tingkat yang lebih tinggi. Jika semakin tinggi rata-rata tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat, maka semakin mudah bagi setiap individu dalam usia bekerja untuk mengerti, menerapkan dan mendapatkan hasil dari kemajuan teknologi dan akhirnya meningkatkan standar ekonomi dan bangsa.

Maka dalam hal ini pemerintah daerah diharapkan harus meningkatkan investasi di bidang pendidikan dan kesehatan untuk mencapai hal tersebut dan juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Adam, Samuel. 2009. Can Foreign Direct Investment (FDI) Help To Promote Growth In Africa. *African Journal of Business Management*. 3 (5) : 178-183
- Adipuryanti, Ni Luh Putu Yuni; Sudibia, I Ketut. Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk Yang Bekerja dan Investasi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Melalui Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *PIRAMIDA*, [S.l.], v. 11, n. 1, July 2015. ISSN 1907-3275. Available at: <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/piramida/article/view/18710>>. Date accessed: 10 Jan. 2019.
- Ady Soejoto; Waspodo Tjipto Subroto dan Suyanto. 2015. Fiscal Decentralization Policy in Promoting Indonesia Human Development. *International Journal of Economics and Financial*. 5(3) : 763-771
- Almfraji, Almsafir, Liu Yao. 2014. Economic Growth and Foreign Direct Investment Inflows: The Case of Qatar. *Social and Behavioral Sciences*, 10(9) : 1040 – 1045
- Ardiansyah, Vitalis Ari Widiyaningsih. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
- Artana Yasa, I Komang Oka; Arka, Sudarsana. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Antardaerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, [S.l.], Nov. 2015. ISSN 2303-0186. Available at: <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/jekt/article/view/16494>>. Date accessed: 11 Sep. 2017. *Vol. 8, No. 1, pp: 1-112*
- Astri, Meylina. 2013. Pengeruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembanguana Manusia di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi Bisnis*. 11 (1) : 89-101
- Ayu Putri Wahyuni, I Gusti; Made Sukarsa dan Nyoman Yuliarmi. 2014. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesenjangan Pendapatan Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*. 3(8) : 458-477

- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. 2010-2014. *Bali Dalam Angka 2010- 2015*. Denpasar.
- Blane D. Lewis (2006) Local government taxation: An analysis of administrative cost inefficiency. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. 42(2) : 213-233
- Bendesa, I Komang Gde. Sumberdaya Manusia Berkualitas dan Berkarakter. *PIRAMIDA*, [S.l.], v. 10, n. 1, july 2014. ISSN 1907-3275. Available at: <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/piramida/article/view/15949>>. Date accessed: 10 jan. 2019.
- Chukwunonso Gerald Iheoma. 2014. Impact of Social Spending on Human Development in Sub-Saharan Africa. *American Journal of Social Sciences*. 2(2): 29-35.
- Christian von Luebke (2009) The political economy of local governance: findings from an Indonesian field study. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. 45(2) : 201-230
- Deddy Rustiono .2008. Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jawa Tengah. *Tesis* Ekonomi Pembangunan.
- DJPK Kemenkeu. 2015. Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali Tahun 2010-2015.
- DJPK Kemenkeu. 2015. Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Di Kesehatan Pendidikan Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali Tahun 2010-2015.
- Eleonora, Sofilda., Nurhayati., Muhammad Zilal Hamzah. 2015. Government Spending Contributions on per Capita Income and its Effect toward the Human Development Index (Comparative Study between Western Indonesia and Central & East Indonesia). *Journal of Social and Development Sciences*. 6(3) : 43-49
- Fajri, Muhammad; Delis, Arman; Amzar, Yohanes Vyn. Dampak Otonomi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Keterbukaan Daerah Terhadap Ketimpangan Wilayah di Sumatera. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, [S.l.], jan. 2017. ISSN 2303-0186. Available at: <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/jekt/article/view/27422>>. Date accessed: 11 sep. 2017. *Vol. 9, No. 2, pp: 99 – 107*
- Felix, Olurankinse. 2012. Analysis of the effectiveness of capital expenditure budgeting in the local government system of Ondo State, Nigeria. *Journal of Accounting and Taxation*. 4(1) : 1-6.
- Guisan, Maria-Carmen. 2010. Health Expenditure, Education, Government Effectiveness And Quality Of Life In Africa And Asia. *Journal Regional and Sectoral Economic Studies*. 10(1) : 116-126.

- Hariwan, Peggy; Swaningrum, Ayu. Analisis Indeks Pembangunan Manusia Pada 5 Wilayah Hasil Pemekaran Di Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, [S.l.], nov. 2015. ISSN 2303-0186. Available at: <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/jekt/article/view/16496>>. Date accessed: 11 sep. 2017. *Vol. 8, No. 1, pp: 72-82*
- Hutajulu, Halomoan; Sanggrangbano, Agustina; Bonay, Antonia K. Kajian Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jayapura Pada Era Otonomi Khusus. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, [S.l.], oct. 2012. ISSN 2303-0186. Available at: <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/jekt/article/view/1903>>. Date accessed: 12 sep. 2017. *Vol. 5. No. 2, pp:79-150*
- James J. Hecman. 2005. China's Human Capital Investment. *Journal of economic at the university of Chicago*. 16(5) : 50-70
- Jones, Stewart dan R., G., Walker. 2007. Explanators of local Government Distress. *Journal ABACUS*. 43(3) : 396-418.
- Kusuma, Hendra. Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, [S.l.], july 2016. ISSN 2303-0186. Available at: <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/jekt/article/view/22735>>. Date accessed: 11 sep. 2017. *Vol. 9, No. 1, pp: 1-92*
- Nabeela, Asghar., Zakir Hussain., Hafeez Ur Rehman. 2012. The impact of government spending on poverty reduction: Evidence from Pakistan 1972 to 2008. *African Journal of Business Management*. 6(3) : 845-853.
- Nata Wirawan. 2009. *Cara Mudah Memahami Statistik 2 (Statistik Inferensial) Untuk ekonomi dan Bisnis*. Edisi Kedua. Denpasar: Keraras Emas.
- Natasha Hamilton-Hart & Günther G. Schulze (2016) Taxing Times in Indonesia: The Challenge of Restoring Competitiveness and the Search for Fiscal Space, *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. 52(3) : 265-295.
- Nehen, I.K. 2012. Pembangunan Manusia Bagi Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia Dari Sisi Daya Beli, Kesehatan Dan Pendidikan. Denpasar: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Ogujiuba, Kanayo and Abraham, Terfa W. 2012. Testing the Relationship between Government Revenue and Expenditure: Evidence from Nigeria. *International Journal of Economics and Finance*. 4( 11) : 172-182.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005, Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Richardson Kojo Edeme. 2014. Analyzing the Effects of Sectoral Public Spending On Human Development in Nigeria: Evidence from Panel Data. *Journal Of Humanities And Social Science*. 19(9) : 01-13
- Rustariyuni, Surya Dewi. Pengaruh Gini Ratio, Pengeluaran Non Makanan Per Kapita, Belanja Daerah Dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Pada Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali Periode 2004-2012. *PIRAMIDA*, [S.l.], v. 10, n. 1, july 2014. ISSN 1907-3275. Available at: <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/piramida/article/view/15954>>. Date accessed: 10 jan. 2019.
- Santi Nurmainah. 2013. Analisis Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah, Tenaga Kerja Terserap Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan. *Jurnal bisnis dan ekonomi (JBE)*. 20(2): 131-141
- Sayekti, S. 2009. Pengeruh Investasi, Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal ekuitas*. 15(4) : 477-500
- Sodik, Jamzani dan Didi Nuryadin. 2005. Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Regional (Studi Kasus Pada 26 Provinsi di Indonesia, Pra dan Pasca Otonomi). *Jurnal Ekonomi Pembangunan Kajian Ekonomi Negara Berkembang*. Fakultas Ekonomi Veteran Yogyakarta. 2(2) : 157-170
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung, Penerbit CV. Alfabeta.
- Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung, Penerbit CV. Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. 2004. *Pengantar Makroekonomi*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Umar, Husein, 2005, *Metodologi Penelitian, Aplikasi dalam pemasaran*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Wong, Jhon D. 2004. The Fiscal Impact Of Economic Growth And Development On Local Government Capacity. *Jurnal of public bugeting. Accounting and financial management*. 16(3) : 799-816